

STUDI DISTRIBUSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KOTA BANDUNG

SITI CALULLA PUTRI¹, ACHMAD FAUZAN ISCAHYONO²

1. Program Perencanaan Wilayah dan Kota,
Institut Teknologi Nasional Bandung
2. Program Perencanaan Wilayah dan Kota,
Institut Teknologi Nasional Bandung
Email: siti.calulla@mhs.itenas.ac.id

ABSTRAK

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB menimbulkan masalah di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya daerah yang belum memiliki sekolah negeri, yang dikenal sebagai "blind spot". Fenomena ini terjadi di Kota Bandung, khususnya di Kecamatan Cinambo yang masih belum memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama sistem zonasi, yaitu meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi persebaran infrastruktur Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) berdasarkan sistem zonasi PPDB di Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran infrastruktur SMPN di Kota Bandung belum merata, karena masih banyak kecamatan yang tidak terlayani oleh radius zonasi sekolah.

Kata kunci: Infrastruktur Pendidikan, Pesebaran, Zonasi, Sekolah Menengah Pertama Negeri.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menilai tingkat pembangunan manusia suatu negara sehingga kontribusinya sangat relevan dalam memajukan kualitas hidup dan perkembangan masyarakat di negara tersebut (Farawowan et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki sistem pendidikan yang baik. Salah satu contoh negara yang telah mencapai taraf kemajuan dengan sistem pendidikan terbaik dan memperoleh pengakuan secara global adalah negara Jepang. Sistem pendidikan unggul yang diterapkan di Jepang adalah sistem pendidikan zonasi.

Sistem zonasi sekolah adalah sistem di mana peserta didik diharuskan memilih sekolah yang berada dalam radius terdekat sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka (Safitri & Yusran, 2021). Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan berbasis zonasi pada PPDB, kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap sejak tahun 2017 hingga saat ini yang diatur berdasarkan kebijakan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sistem zonasi memiliki dua tujuan utama pertama, meningkatkan keadilan dan pemerataan akses pendidikan, kedua, memastikan kualitas layanan pendidikan tersebar secara merata. (Kemendikbud, 2020).

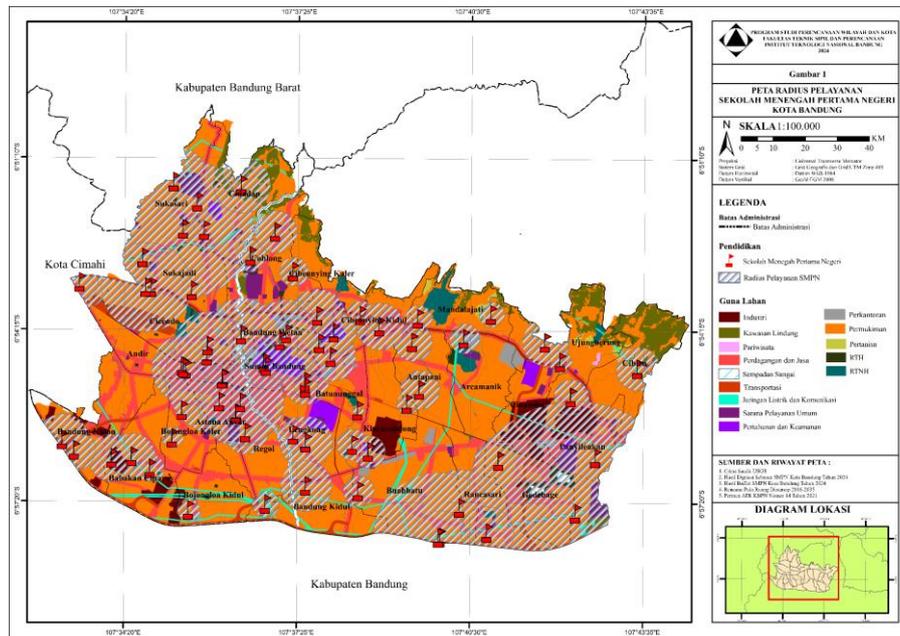
Namun, penerapan sistem zonasi dalam PPDB yang bertujuan baik tersebut justru menimbulkan berbagai masalah pada saat implementasinya karena belum meratanya infrastruktur pendidikan di setiap daerah. Fenomena serupa juga terjadi di Kota Bandung, salah satu keluhan dari orang tua siswa adalah bahwa sistem zonasi menciptakan kesulitan bagi daerah-daerah yang belum memiliki sekolah negeri, yang disebut sebagai "blind spot". Sebagai contoh, Kecamatan Cinambo di Kota Bandung masih belum memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri (Aurellia, 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana persebaran infrastruktur Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung dalam memberikan layanan ke berbagai wilayah sesuai dengan ketentuan jarak dalam sistem zonasi PPDB.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci terkait variabel-variabel tertentu seperti jumlah sebaran infrastruktur pendidikan SMPN dan luas kecamatan yang terlayani oleh ketentuan radius zonasi SMPN. Metode analisis deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap indikator-indikator variabel penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai variabel-variabel tersebut (Putro dkk., 2023). Metode penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan dengan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dibantu oleh perangkat lunak Arcgis. Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dilakukan untuk menganalisis turunan SIG, berupa *buffer* dan *overlay*. Langkah pertama adalah pengumpulan data kewilayahan yang mencakup luas wilayah Kota Bandung berdasarkan jumlah kecamatan, lokasi atau titik infrastruktur pendidikan, dan ketentuan radius jarak sistem zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) berdasarkan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis *buffer* untuk memvisualisasikan dan mengukur cakupan pelayanan dari setiap SMPN berdasarkan radius ketentuan zonasi. Langkah terakhir adalah melakukan *overlay* antara peta wilayah dan peta radius jarak infrastruktur pendidikan. Analisis *overlay* ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang wilayah atau kecamatan di Kota Bandung yang terlayani dan tidak terlayani oleh radius zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

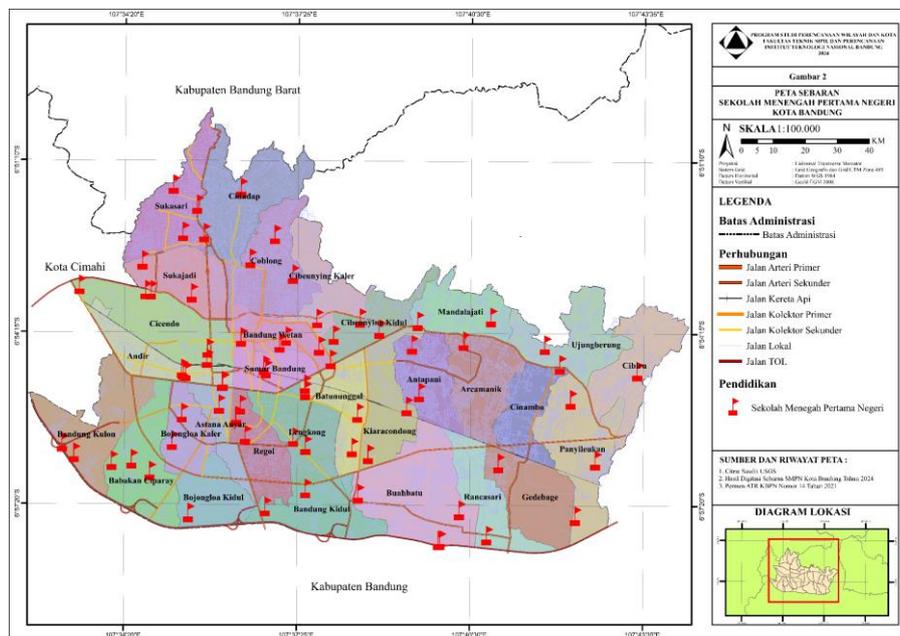
3. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis *buffer*, radius pelayanan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Bandung berkisar antara 185 hingga 3.708 meter. Radius ini mencakup wilayah kecamatan tempat sekolah tersebut berada dan sekitarnya. Dari hasil analisis tersebut, dapat dilihat pada **Gambar 1** hanya terdapat tiga kecamatan yang sudah terlayani 100% oleh zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan wilayah yang dilayani tersebut sebagian besar berupa guna lahan permukiman. Kecamatan yang sudah terlayani adalah Kecamatan Gedebage, Sumur Bandung dan Bandung Wetan. Sedangkan, kecamatan lainnya masih memiliki area yang tidak terlayani oleh zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).



Gambar 1. Peta Radius Pelayanan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung (Sumber: Hasil Pengolahan dari Data Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2024)

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 75 infrastruktur Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Kota Bandung, sekolah-sekolah tersebut belum mampu melayani seluruh kecamatan di Kota Bandung. Hal tersebut juga didukung oleh sebaran infrastruktur Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang tidak merata di setiap kecamatan dapat dilihat Pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Peta Sebaran Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung (Sumber: Hasil Observasi dan Data Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2024)

4. KESIMPULAN

Persebaran infratraktur Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Bandung berdasarkan hasil analisis *buffer* masih belum merata hal tersebut dikarenakan dari 75 infratraktur Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Kota Bandung hanya terdapat tiga kecamatan yang sudah terlayani sepenuhnya oleh zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Sehingga masih banyaknya kecamatan yang tidak terlayani sepenuhnya oleh zonasi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) yaitu Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Cibiru, Panyileukan, Ujung Berung, Cinambo, Arcamanik, Antapani, Mandalajati, Kiaracondong, Batununggal, Andir, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Coblong, Sukasari, Cidadap, Sukajadi dan Cicendo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan penulis kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk anaknya agar dapat menyelesaikan pendidikannya dan menjadi orang yang berguna kelak suatu hari nanti. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih bapak Achmad Fauzan Iscahyono, S.T., M.PWK. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian saya dan tidak lupa kepada rekan-rekan yang selalu memberikan hiburan dan motivasi selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Aurellia, A. (2023). *Saran DPRD untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kota Bandung*. 27 Jun. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6792528/saran-dprd-untuk-tingkatkan-mutu-pendidikan-di-kota-bandung>
- Farawowan, Y., Poli, H., & Mastutie, F. (2020). Kajian Ketersediaan Sarana Pendidikan Di Kawasan Perkotaan Amurang. *Spasial*, 7(1), 1–10.
- Putro, H. P. H., Trinanda, R. F., & Iscahyono, A. F. (2023). Understanding Airport Leakage at Multi Airport in West Java through Accessibility Characteristics to the Airport. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 25(2), 161-169.
- Kemendikbud. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Berdasarkan Zonasi Pendidikan*.
- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 92–100. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436>